

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 3 TAHUN 2011</b>	<b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2016</b>
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
BUPATI BINTAN	BUPATI BINTAN
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan di Kabupaten Bintan.;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.</p>	<p>a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya sehingga Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan catatan sipil harus dihapuskan;</p> <p>b. bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal uji materiil tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mencabut penjelasan atas Pasal 124 Undang-</p>

	<p>Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus diubah;</p> <p>c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan bidang perdagangan khususnya pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal berupa tera, tera ulang berada di kabupaten sehingga pungutan retribusi menjadi kewenangan kabupaten/kota;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.</p>
Meningat :	Meningat :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015</li> </ol>

<p>3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Sebagaimana Telah Diubah UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);</p>
---	--

<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 tahun Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5)</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3);</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM..</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Bintan</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.</li> <li>4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> <li>6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.</li> <li>7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</li> <li>8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.</li> <li>9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah pengelola pemungut retribusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.</li> <li>7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.</li> <li>8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan kepentingan orang Pribadi atau Badan.</li> <li>9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,</li> </ol>
---	---

<p>Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.</p> <p>11. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.</p> <p>12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur. 1</p> <p>13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.</p> <p>14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.</p> <p>15. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);</li> <li>b. Puskesmas Pembantu;</li> <li>c. Puskesmas Keliling;</li> <li>d. Rumah Bersalin.</li> <li>e. Rumah Sakit Umum Daerah</li> </ol>	<p>organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.</p> <p>11. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.</p> <p>12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.</p> <p>13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.</p> <p>14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian / cacat.</p> <p>15. Tetap</p> <p>16. Tetap</p>
---	---

<p>16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.</p> <p>17. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.</p> <p>18. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.</p> <p>19. Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB adalah Rumah Bersalin yang melayani pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya.</p> <p>20. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>21. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.</p> <p>22. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.</p>	<p>17. Tetap</p> <p>18. Tetap</p> <p>19. Tetap</p> <p>20. Tetap</p> <p>21. Tetap</p> <p>22. Tetap</p> <p>23. Tetap</p> <p>24. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>25. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.</p> <p>26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.</p> <p>27. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.</p> <p>28. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat pedagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>29. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat</p>
---	---

<p>23. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.</p> <p>24. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum Publik/Privat.</p> <p>25. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>26. Kendaraan adalah kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.</p> <p>27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.</p> <p>28. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.</p> <p>29. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>30. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kabakaran.</p> <p>31. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.</p> <p>32. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.</p> <p>33. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busaracun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.</p> <p>34. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>35. Peta foto adalah Peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.</p> <p>36. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.</p>
---	---

<p>30. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>31. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kabakaran.</p> <p>32. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.</p> <p>33. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.</p> <p>34. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busa racun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.</p> <p>35. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>36. Peta foto adalah Peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.</p> <p>37. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.</p>	<p>37. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.</p> <p>38. Retribusi Penyedotan Kakus adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.</p> <p>39. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan uang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.</p> <p>40. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus;</p> <p>41. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.</p> <p>42. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrolgian.</p>
--	---

- |   |   |
|---|---|
| <p>38. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.</p> <p>39. Retribusi Penyedotan Kakus adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.</p> <p>40. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.</p> <p>41. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>43. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.</p> <p>44. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.</p> <p>45. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.</p> | <p>43. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.</p> <p>44. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</p> <p>45. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.</p> <p>46. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur,takar dan timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan.</p> <p>47. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.</p> <p>48. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.</p> <p>49. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan</p> |
|---|---|

- |   |  |
|---|--|
| <p>46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerana jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.</p> <p>49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta</p> | <p>dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan internasional untuk Satuan ukuran.</p> <p>50. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.</p> <p>51. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disebut Pengujian BDKT adalah pengujian kuantum ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.</p> <p>52. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>54. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.</p> <p>55. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.</p> <p>56. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan</p> |
|---|--|

<p>mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.</p>	<p>untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.</p> <p>57. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.</p> <p>60. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi</p>
---	---

	<p>dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>62. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.</p> <p>2. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dihapus dan ditambah satu huruf yakni huruf k, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>JENIS RETRIBUSI JASA UMUM</b> <b>Pasal 2</b></p> <p>Jenis Retribusi Jasa Umum dipungut Kabupaten Bintan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> <li>b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan</li> <li>c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil</li> <li>d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</li> <li>e. Retribusi Pelayanan Pasar</li> <li>f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</li> </ol>	<p>2. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dihapus dan ditambah satu huruf yakni huruf k, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Jenis Retribusi Jasa Umum dipungut daerah terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. retribusi pelayanan kesehatan;</li> <li>b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;</li> <li>c. dihapus;</li> <li>d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;</li> <li>e. retribusi pelayanan pasar;</li> <li>f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;</li> <li>g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;</li> <li>h. retribusi penggantian biaya cetak peta;</li> </ol>

<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</li> <li>i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus</li> <li>j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;</li> <li>j. retribusi pengendalian menara telekomunikasi;</li> <li>k. retribusi pelayanan tera/tera ulang.</li> </ul>
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</b></p> <p><b>Bagian Kesatu</b></p> <p><b>Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</b></p> <p><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>Tetap</p>

<p>Subjek Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasal 5</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi Pelayanan yang diberikan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif Retribusi Pasal 6</p> <p>Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di tetapkan sebagai berikut:</p>	Tetap

a. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Medis Rumah Sakit Pelayanan di Instalasi Rawat Inap Kelas I

No	Bagian/Instalasi/ Unit Pelayanan	Jenis & Kalsifikasi Nama tindakan, Pemeriksaan	Kelas I		
			JRS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Akomodasi		57,000	0	57,000
2	Visite dr. Spesialis		0	30,000	30,000
3	Visite dr. Jaga		0	20,000	20,000
4	Konsul dr. Spesialis		0	30,000	30,000
5	Konsul Cito (dr.spesialis)		0	35,000	35,000
6	Tindakan :				
	a. Instalasi Bedah Central :				
	1. Operasi :				
	a) Bedah, Kebidanan, Kandungan	Besar Khusus	840,000	750,000	2,590,000
		Besar	770,000	200,000	1,970,000
		Sedang	640,000	710,000	1,350,000
		Kecil	325,000	390,000	715,000
	b) Mata dan THT	Besar Khusus	200,000	760,000	960,000
		Besar	175,000	670,000	845,000
		Sedang	150,000	580,000	730,000
		Kecil	125,000	490,000	615,000
	2. Non Operasi				
	a) Bedah	Besar Khusus	212,500	212,500	425,000
		Besar	162,500	162,500	325,000
		Sedang	100,000	100,000	200,000
		Kecil	27,500	27,500	55,000
	b) Kebidanan	Besar	162,500	162,500	325,000
		Sedang	100,000	100,000	200,000

		Kecil	22,500	22,500	45,000
	c) Mata dan THT	Sedang	100,000	100,000	200,000
		Kecil	22,500	22,500	45,000
	b. Instalasi / Ruang Rawat Inap				
	1. Kebidanan	a) Hidrotubasi	50,000	120,000	170,000
		b) Laparoscopi	180,000	850,000	1,030,000
		c) USG Kebidanan	20,000	35,000	55,000
		d) Persalinan			
		1) Normal Bidan	75,000	75,000	150,000
		2) Normal Dokter	85,000	100,000	185,000
		3) Dengan Penyulit	125,000	200,000	325,000
	2. Rehabilitasi Medik	a) Fisiotherapy			
		1) Canggih	7,500	10,500	18,000
		2) Sedang	3,000	8,000	11,000
		3) Sederhana	1,500	3,500	5,000
		b) Tarif Ortotik & Prostetik			0
		1) Canggih	30,000	60,000	90,000
		2) Sedang	12,000	24,000	36,000
		3) Sederhana	6,000	12,000	18,000
	c. Laboratorium				
		1. Hematologi			
		a. sederhana	2,000	2,000	4,000
		b. Sedang	9,500	3,000	12,500
		c. canggih	4,000	26,000	30,000
		2. Urine			
		a. sederhana	2,000	2,000	4,000
		b. Sedang	3,500	3,000	6,500
		c. canggih	5,500	2,000	7,500
		3. Feses			
		a. sederhana	2,500	2,000	4,500
		b. Sedang	3,000	2,000	5,000
		4. Analisa Sperma	19,000	6,000	25,000
		5. Kimia			
		a. sederhana	7,000	3,000	10,000
		b. Sedang	10,000	5,000	15,000
		c. canggih	19,000	5,000	24,000
		d. Khusus	30,000	5,000	35,000
		6. Liquor	2,500	3,000	5,500
		7. Mikrobiologi Sederhana	4,000	2,000	6,000
		8. Immunologi			
		a) sederhana	16,000	3,000	19,000
		b) Sedang	34,000	6,000	40,000
		c) canggih	55,000	10,000	65,000
	d. Radiologi				
		1. Foto Polos Tanpa kontras			
		a) Pemeriksaan 1 Posisi	18,000	17,000	35,000
		b) Pemeriksaan 2 Posisi	32,000	28,000	60,000
		c) Pemeriksaan 3-4 Posisi	50,000	40,000	90,000
		2. Pemeriksaan Sedang			
		a) IVP	170,000	80,000	250,000
		b) Cystografi	115,000	60,000	175,000
		c) Urethrogram	115,000	60,000	175,000
		d) H S G	120,000	80,000	200,000

	e) Cor Analisa	50,000	40,000	90,000
	f) Oesophagografi	70,000	50,000	120,000
	g) O M D	100,000	75,000	175,000
	h) Usus Halus	100,000	75,000	175,000
	i) Colon In Loop	135,000	90,000	225,000
	j) Fistulografi	115,000	60,000	175,000
	k) USG	30,000	50,000	80,000
	l) Appendicogram	50,000	40,000	90,000
e. Tindakan Non Bedah	1. Vena Seksi			
	2. Pungsi Pleura/ Peritoneum /Pericard	75,000	125,000	200,000
	3. Pungsi Sendi	50,000	100,000	150,000
	4. Pungsi LCS	75,000	125,000	200,000
	5.			
	6. Pungsi Hepar	75,000	125,000	200,000
	7. BMP	75,000	125,000	200,000
	8. Inhalasi	50,000	50,000	100,000
f. Tindakan Keperawatan	1. Tindakan Sederhana	7,500	12,500	20,000
	2. Tindakan Kecil	10,000	15,000	25,000
	3. Tindakan sedang	15,000	25,000	40,000

b. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Medis Rumah Sakit Pelayanan di instalasi Rawat inap Kelas II

No	Bagian/Instalasi/ Unit Pelayanan	Jenis & Klasifikasi Nama Tindakan Pemeriksaan	Kelas II			Jumlah (Rp)	SETELAH DIKURANGI (Rp)
			JRS (Rp)	JP (Rp)			
				JP	Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Akomodasi		26,000	0		26,000	
2	Visite dr. Spesialis		0	25,000		25,000	
3	Visite dr. Jaga		0	15,000		15,000	
4	Konsul dr. Spesialis		0	25,000		25,000	
5	Konsul Cito (dr. spesialis)		0	25,000		25,000	
6	Tindakan :						
	a. Instalasi Bedah Central :						
	1. Operasi :	Besar Khusus	745,000	1,470,000	443,000	2,215,000	1,772,000
	a) Bedah, Kebidanan, Kandungan	Besar	720,000	905,000	325,000	1,625,000	1,300,000
		Sedang	590,000	600,000	238,000	1,190,000	952,000
		Kecil	325,000	215,000	108,000	540,000	432,000
	b) Mata dan THT	Besar Khusus	175,000	605,000	156,000	780,000	624,000
		Besar	150,000	515,000	133,000	665,000	532,000
		Sedang	125,000	425,000	110,000	550,000	440,000
		Kecil	100,000	335,000	87,000	435,000	348,000

2. Non Operasi	a) Bedah	Besar Khusus	175,000	175,000	70,000	350,000	280,000	
		Besar	125,000	125,000	50,000	250,000	200,000	
		Sedang	87,500	87,500	-	175,000	-	
		Kecil	17,500	17,500	-	35,000	-	
	b) Kebidanan	Besar	112,500	112,500	-	225,000	-	
		Sedang	75,000	75,000	-	150,000	-	
		Kecil	17,500	17,500	-	35,000	-	
	c) Mata dan THT	Sedang	50,000	50,000	-	100,000	-	
		Kecil	17,500	17,500	-	35,000	-	
	b. Instalasi / Ruang Rawat Inap:	1. Kebidanan	a) Hidrotu basi	45,000	95,000	-	140,000	-
b) Laparos kopi			175,000	700,000	175,000	875,000	700,000	
c) USG Kebidanan			15,000	30,000	-	45,000	-	
d) Persalinan			-	-	-	-	-	
1) Normal Bidan			60,000	70,000	-	130,000	-	
2) Normal Dokter			70,000	100,000	-	170,000	-	
3) Dengan Penyulit			100,000	175,000	-	275,000	-	
2. Rehabilitasi Medik	a) Fisioherapy	1) Canggih	5,000	7,500	-	12,500	-	
		2) Sedang	2,000	4,500	-	6,500	-	
		3) Sederhana	1,000	2,000	-	3,000	-	
		b) Tarif Ortotik & Prostetik	-	-	-	-	-	
		1) Canggih	30,000	45,000	-	75,000	-	
		2) Sedang	12,000	18,000	-	30,000	-	
	3) Sederhana	6,000	9,000	-	15,000	-		
	c. Laboratorium	1. Hematologi	a) sederhana	1,500	1,500	-	3,000	-
			b) Sedang	8,500	2,000	-	10,500	-
			c) canggih	4,000	16,000	-	20,000	-
2. Urine		a) sederhana	1,500	1,500	-	3,000	-	
		b) Sedang	3,000	2,000	-	5,000	-	
		c) canggih	5,000	2,000	-	7,000	-	
3. Feses		a) sederhana	2,000	1,500	-	3,500	-	
		b) Sedang	2,500	1,500	-	4,000	-	
4. Analisa Sperma		17,500	4,000	-	21,500	-		
5. Kimia		a) sederhana	6,000	2,000	-	8,000	-	

	b) Sedang	9,000	3,000	12,000
	c) canggih	17,000	4,000	21,000
	d) Khusus	26,000	4,000	30,000
	6. Liqueur	2,000	2,000	4,000
	7. Mikrobiologi Sederhana	3,500	2,000	5,500
	8. Immunologi			
	a) sederhana	15,000	2,000	17,000
	b) Sedang	32,000	4,000	36,000
	c) canggih	50,000	6,000	56,000
d. Radiologi	1. Foto Polos Tanpa kontras			
	a) Pemeriksaan 1 Posisi	16,000	14,000	30,000
	b) Pemeriksaan 2 Posisi	28,000	22,000	50,000
	c) Pemeriksaan 3-4 Posisi	40,000	30,000	70,000
	1. Pemeriksaan Sedang			
	a) IVP	140,000	60,000	200,000
	b) Cystografi	100,000	50,000	150,000
	c) Urethrogram	100,000	50,000	150,000
	d) H S G	100,000	75,000	175,000
	e) Cor Analisa	40,000	30,000	70,000
	f) Oesophagografi	60,000	40,000	100,000
	g) O M D	80,000	60,000	140,000
	h) Usus Halus	80,000	60,000	140,000
	i) Colon In Loop	120,000	80,000	200,000
	j) Fistulografi	100,000	50,000	150,000
	k) USG	20,000	40,000	60,000
	l) Appendicogram	40,000	30,000	70,000
e. TINDAKAN NON BEDAH	1. Vena Seksi			
	2. Punksi Pleura/ Peritonum /Pericard	50,000	100,000	150,000
	3. Punksi Sendi	25,000	75,000	100,000
	4. Punksi LCS	50,000	100,000	150,000
	5. Punksi Hepar	50,000	100,000	150,000
	6. BMP	50,000	100,000	150,000
	7. Inhalasi	37,500	37,500	75,000
f. Tindakan Keperawatan	1. Tindakan Sederhana	5,000	10,000	15,000
	2. Tindakan Kecil	7,500	12,500	20,000
	3. Tindakan sedang	12,500	17,500	30,000

c. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Medis Rumah Sakit Pelayanan di Instalasi Rawat Inap Kelas III

No	Bagian/Instalasi/ Unit Pelayanan	Jenis & Kalsifikasi Nama tindakan, Pemeriksaan	Kelas I		Jumlah (Rp)
			JRS (Rp)	JP (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Akomodasi		9,000	0	9,000
2	Visite dr. Spesialis		0	20,000	20,000
3	Visite dr. Jaga		0	10,000	10,000
4	Konsul dr. Spesialis		0	20,000	20,000
5	Konsul Cito (dr.spesialis)		0	20,000	20,000
6	Tindakan :				
	a. Instalasi Bedah Central :				
	1. Operasi :				
	a) Bedah, Kebidanan, Kandungan	Besar Khusus	596,000	320,000	916,000
		Besar	576,000	184,000	760,000
		Sedang	472,000	108,000	580,000
		Kecil	240,000	70,400	310,400
	b) Mata dan THT	Besar Khusus	120,000	360,000	480,000
		Besar	100,000	288,000	388,000
		Sedang	80,000	216,000	296,000
		Kecil	60,000	144,000	204,000
	2. Non Operasi				
	a) Bedah	Besar Khusus	100,000	100,000	200,000
		Besar	87,500	87,500	175,000
		Sedang	75,000	75,000	150,000
		Kecil	12,500	12,500	25,000
	b) Kebidanan	Besar	62,500	62,500	125,000
		Sedang	50,000	50,000	100,000
		Kecil	12,500	12,500	25,000
	c) Mata dan THT	Sedang	37,500	37,500	75,000
		Kecil	10,000	10,000	20,000
	b. Instalasi / Ruang Rawat Inap				
	1. Kebidanan	a) Hidrotubasi	40,000	75,000	115,000
		b) Laparoskopi	112,000	360,000	472,000
		c) USG Kebidanan	10,000	15,000	25,000
		d) Persalinan			
		1) Normal Bidan	40,500	35,000	75,500
		2) Normal Dokter	40,500	45,000	85,500

	3) Dengan Penyulit	70,000	125,000	195,000
2. Rehabilitasi Medik	c) Fisiotherapy			
	1) Canggih	5,000	4,500	9,500
	2) Sedang	2,000	2,000	4,000
	3) Sederhana	1,000	1,500	2,500
	d) Tarif Ortotik & Prostetik			0
	1) Canggih	30,000	30,000	60,000
	2) Sedang	12,000	12,000	24,000
	3) Sederhana	6,000	6,000	12,000
c. Laboratorium	1. Hematologi			
	a. sederhana	1,500	1,000	2,500
	b. Sedang	8,000	1,000	9,000
	c. canggih	4,000	11,000	15,000
	2. Urine			
	a. sederhana	1,000	1,000	2,000
	b. Sedang	2,000	1,000	3,000
	c) canggih	4,500	1,000	5,500
	3. Feses			
	a) sederhana	1,500	1,000	2,500
	b) Sedang	2,000	1,000	3,000
	4. Analisa Sperma	15,000	1,000	16,000
	5. Kimia			
	a) sederhana	5,000	1,000	6,000
	b) Sedang	8,000	1,000	9,000
	c) canggih	15,000	1,000	16,000
	d) Khusus	23,000	2,000	25,000
	6. Liquor	1,500	1,000	2,500
	7. Mikrobiologi Sederhana	3,000	1,000	4,000
	8. Immunologi			
	a) sederhana	12,000	1,000	13,000
	b) Sedang	30,000	1,000	31,000
	c) canggih	45,000	2,000	47,000
d. Radiologi	1. Foto Polos Tanpa Kontras			
	a) Pemeriksaan 1 Posisi	12,000	10,000	22,000

		b) Pemeriksaan 2 Posisi	25.000	13.000	38.000
		c) Pemeriksaan 3-4 Posisi	33.000	17.000	50.000
		2. Pemeriksaan Sedang			
		a) IVP	110.000	40.000	150.000
		b) Cystografi	80.000	30.000	110.000
		c) Urethrogram	80.000	30.000	110.000
		d) H S G	90.000	60.000	150.000
		e) Cor Analisa	30.000	20.000	50.000
		f) Oesophagog rafi	50.000	30.000	80.000
		g) O M D	65.000	35.000	100.000
		h) Usus Halus	65.000	35.000	100.000
		i) Colon In Loop	100.000	50.000	150.000
		j) Fistulografi	80.000	30.000	110.000
		k) USG	20.000	20.000	40.000
		l) Appendicogr am	30.000	20.000	50.000
	e. Tindakan Non Bedah	1. Vena Seksi			
		2. Pungsi Pleura/ Peritoneum /Pericard	50.000	75.000	125.000
		3. Pungsi Sendi	20.000	55.000	75.000
		4. Pungsi LCS	50.000	75.000	125.000
		5. Pungsi Hepar	50.000	75.000	125.000
		6. BMP	50.000	75.000	125.000
		7. Inhalasi	25.000	25.000	50.000
	f. Tindakan Keperawatan	1. Tindakan Sederhana	2.000	3.000	5.000
		2. Tindakan Kecil	5.000	5.000	10.000
		3. Tindakan sedang	10.000	10.000	20.000

d. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Medis Rumah Sakit tarif Resusitasi

JENIS TINDAKAN	KELAS									
	VIP		ICU		I		II		III	
	JRS (Rp.)	JP (Rp.)								
Tindakan Resusitasi	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	200.000	100.000	75.000
<b>Jumlah</b>	300.000		300.000		300.000		300.000		175.000	

e. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Medis Rumah Sakit Kelas Utama A / ICU

No	Bagian/Instalasi/ Unit Pelayanan	Jenis & Kalsifikasi Nama tindakan, Pemeriksaan	Kelas I		
			JRS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Akomodasi		150.000	0	150.000
2	Visite dr. Spesialis		0	45.000	45.000
3	Visite dr. Jaga		0	22.500	22.500
4	Konsul dr. Spesialis		0	50.000	50.000
5	Konsul Cito (dr. spesialis)		0	75.000	75.000
6	Tindakan :				
	a. Non Operasi				
	1. Bedah	Besar Khusus	300.000	300.000	600.000
		Besar	275.000	275.000	550.000
		Sedang	250.000	250.000	500.000
		Kecil	75.000	75.000	150.000
	2. Kebidanan	Besar	275.000	275.000	550.000
		Sedang	275.000	275.000	550.000
		Kecil	75.000	75.000	150.000
	3. Mata dan THT	Sedang	250.000	250.000	500.000
		Kecil	75.000	75.000	150.000
	b. Tindakan Non Bedah	inhalasi	87.500	87.500	175.000
	c. Tindakan Keperawatan	1. Tindakan Sederhana	12.500	17.500	30.000
		2. Tindakan Kecil	15.000	20.000	35.000
		3. Tindakan sedang	30.000	40.000	70.000

f. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Medis Rumah Sakit Pelayanan di instalasi  
Rawat Inap Kelas Utama B /VIP

No	Bagian/Instalasi/ Unit Pelayanan	Jenis & Kalsifikasi Nama tindakan, Pemeriksaan	Kelas I		
			JRS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Akomodasi		88,000	0	88,000
2	Visite dr. Spesialis		0	42,000	42,000
3	Visite dr. Jaga		0	21,000	21,000
4	Konsul dr. Spesialis		0	30,000	30,000
5	Konsul Cito (dr.spesialis)		0	40,000	40,000
6	Tindakan :				
	a. Instalasi Bedah Central :				
	1. Operasi :				
	a)Bedah,Kebidanan,Kandung gan	Besar Khusus	885,000	2,200,000	3,085,000
		Besar	795,000	1,750,000	2,545,000
		Sedang	670,000	1,200,000	1,870,000
		Kecil	365,000	570,000	935,000
	b) Mata dan THT	Besar Khusus	250,000	980,000	1,230,000
		Besar	200,000	825,000	1,025,000
		Sedang	175,000	735,000	910,000
		Kecil	150,000	645,000	795,000
	2. Non Operasi				
	a)Bedah	Besar Khusus	275,000	275,000	550,000
		Besar	212,500	212,500	425,000
		Sedang	200,000	200,000	400,000
		Kecil	50,000	50,000	100,000
	b)Kebidanan	Besar	212,500	212,500	425,000
		Sedang	200,000	200,000	400,000
		Kecil	50,000	50,000	100,000
	c)Mata dan THT	Sedang	200,000	200,000	400,000
		Kecil	50,000	50,000	100,000

b. Instalasi / Ruang Rawat Inap 1. Kebidanan	a) Hidrotubasi	75,000	145,000	220,000
	b) Laparoscopi	200,000	975,000	1,175,000
	c) USG Kebidanan	25,000	40,000	65,000
	d) Persalinan			
	1) Normal Bidan	75,000	85,000	160,000
	2) Normal Dokter	85,000	125,000	210,000
	3) Dengan Penyulit	125,000	225,000	350,000
c. Laboratorium	1. Hematologi			
	a) sederhana	2,500	3,000	5,500
	b) Sedang	11,000	5,000	16,000
	c) canggih	4,000	36,000	40,000
	2. Urine			
	a) sederhana	2,500	3,000	5,500
	b) Sedang	4,000	4,000	8,000
	c) canggih	6,000	4,000	10,000
	3. Feses			
	a) sederhana	3,000	3,000	6,000
	b) Sedang	4,000	3,000	7,000
	4. Analisa Sperma	20,000	10,000	30,000
	5. Kimia			
	a) sederhana	8,000	4,000	12,000
b) Sedang	12,000	8,000	20,000	
c) canggih	22,000	8,000	30,000	
d) Khusus	35,000	10,000	45,000	
6. Liquor	3,500	4,000	7,500	
7. Mikrobiologi				
Sederhana	4,500	3,000	7,500	
8. Immunologi				
a) sederhana	17,000	4,000	21,000	
b) Sedang	40,000	10,000	50,000	
c) canggih	70,000	20,000	90,000	
d. Radiologi	1. Foto Polos Tanpa Kontras			
	a) Pemeriksaan 1 Posisi	20,000	20,000	40,000
	b) Pemeriksaan 2 Posisi	38,000	32,000	70,000
	c) Pemeriksaan 3-4 Posisi	60,000	50,000	110,000
	2. Pemeriksaan			0

	Sedang			
	a) IVP	180,000	100,000	280,000
	b) Cystografi	125,000	75,000	200,000
	c) Urethrogram	125,000	75,000	200,000
	d) H S G	140,000	90,000	230,000
	e) Cor Analisa	60,000	50,000	110,000
	f) Oesophagografi	80,000	70,000	150,000
	g) O M D	110,000	90,000	200,000
	h) Usus Halus	110,000	90,000	200,000
	i) Colon In Loop	150,000	100,000	250,000
	j) Fistulografi	125,000	75,000	200,000
	k) USG	50,000	50,000	100,000
	l) Appendicogram	60,000	50,000	110,000
	e. Tindakan Non Bedah			
	1. Vena Seksi			
	2. Pungsi Pleura/ Peritoneum /Pericard	100,000	225,000	325,000
	3. Pungsi Sendi	75,000	125,000	200,000
	4. Pungsi LCS	100,000	225,000	325,000
	5. Pungsi Hepar	100,000	225,000	325,000
	6. BMP	100,000	225,000	325,000
	7. Inhalasi	75,000	75,000	150,000
	f. Tindakan Keperawatan			
	1. Tindakan Sederhana	10,000	15,000	25,000
	2. Tindakan Kecil	12,500	17,500	30,000
	3. Tindakan sedang	25,000	35,000	60,000

g. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Medis Rumah Sakit Pelayanan di instalasi Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat, Kamar Jenazah, Ambulance, dan Visum et Repertum.

No	Bagian/Instalasi/ Unit Pelayanan	Jenis & Kalsifikasi Nama tindakan, Pemeriksaan	Kelas I		
			JRS (Rp)	JP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Instalasi Rawat Jalan	Pemeriksaan Khusus			
		1)Pemeriksaan dokter umum	10,000	15,000	25,000
		2)Pemeriksaan dokter gigi	10,000	15,000	25,000
		3) Pemeriksaan dokter spesialis	10,000	25,000	35,000
		4) Tindakan Spesialistik	Sama dengan Tindakan Spesialis kelas II		
		5) Konsultasi Gizi	50 %dari tarif spesialis		

2	Poliklinik Gigi	1. ODONTTECTOMY	50,000	100,000	150,000
		2. EKSISI MUCOLEK	22,500	27,500	50,000
		3. ALVEOLECTOMY	22,500	27,500	50,000
		4. INSISI ABSES	13,500	16,500	30,000
		5. SCALING PER RAHANG	7,500	32,500	40,000
		6. TUMPATAN GIGI:			
		a. TUMP. SEMENTARA	4,500	5,500	10,000
		b. TUM AMALGAM I	10,000	15,000	25,000
		c. TUM AMALGAM II	10,000	15,000	25,000
		d. TUM LIGHT CURING	25,000	25,000	50,000
		7. EXTRASI GIGI :			
		a. Ekstraksi Gigi tetap	7,500	10,000	17,500
		b. EXT. KOMPLIKASI	10,000	15,000	25,000
		c. EXT. GIGI SUSU DG	8,000	7,000	15,000
		d. EXT. GIGI SUSU DGN	5,000	5,000	10,000
		8. TINDAKAN :			
		1. GT. Lepas			
		a. Akrilik			
		- Gigi pertama	30,000	30,000	60,000
		- Gigi berikutnya	5,000	12,000	17,000
		b. Gigi tiruan Coklat			0
		- Gigi pertama	35,000	40,000	75,000
		- Gigi Berikutnya	10,000	25,000	35,000
		2. GT Penuh			
		a. Akrilik RARB kasus jasa	150,000	250,000	400,000
		b. akrilik kasus H	175,000	475,000	650,000
		c. Akrilik kasus plat			0
d. Akrilik Per Rah	75,000	225,000	300,000		
e. Logam per Ra	100,000	250,000	350,000		
3. Reparasi					
a. rebashing	15,000	25,000	40,000		
b. Relining	15,000	27,500	42,500		
c. Retak / patah	10,000	15,000	25,000		
4. GT. Imonediata					
a. gigi I	30,000	35,000	65,000		
5. Oklusal Splint	20,000	30,000	50,000		
3	Instalasi Gawat Darurat	Karcis	6,000	0	6,000
		1. Pemeriksaan	0	9,500	9,500
		2. Tindakan Sederhana	5,000	10,000	15,000
		3. Tindakan kecil	7,500	12,500	20,000
		4. Tindakan Sedang	12,500	17,500	30,000
		5. Tindakan spesialisik	Sama dengan tindakan spesialisik kelas II		

4	Kamar Jenazah	- Kamar Jenazah perhari	10,000	10,000	20,000
		- Pengawetan Jenazah	200,000	100,000	300,000
5	Ambulance	- Kurang dari 5 Km	15,000	15,000	30,000
		- Lebih dari 5 Km + Harga BBM/Km			0
		- Keluar kota ( sama dengan diatas kali 2 (PP)			0
6	VISUM et REPERTUM	1. Hidup	5,000	10,000	15,000
		2. Mati :			
		a. Periksa Luar	25,000	100,000	125,000
		b. Periksa Dalam	100,000	300,000	400,000

h. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Medis di Puskesmas

No	Pemeriksaan & Tindakan Medik	Satuan	TARIF				Total
			Retribusi	Jasa Medis	Bahan Habis Pakai / Sarana / Prasarana	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ADMINISTRASI MEDIK</b>						
	a. Family Folder	1 set / KK	1,000	1,000	8,000	9,000	10,000
	b. Kartu Indeks Berobat	1 lbr	500	-	3,500	3,500	4,000
	c. Kartu status	1 lbr	500	-	500	500	1,000
	d. MS	1 lbr	500	-	4,500	4,500	5,000
2	<b>RAWAT JALAN</b>						
	a. POLI UMUM - Pemeriksaan dasar + Obat dasar	1 x	3,000	5,000	2,000	7,000	10,000

<b>b. POLI SPESIALIS</b> - Pemeriksaan + Obat dasar	1 x	5,000	25,000	10,000	35,000	40,000
<b>c. POLI KEBIDANAN</b>						
1) ANC	1 x	3,000	5,000	2,000	7,000	10,000
2) Penimbangan Bayi	1 x	500	-	500	500	1,000
3) Suntik KB 1 bulan	1 x	8,000	4,000	8,000	12,000	20,000
4) Suntik KB 3 bulan	1 x	5,000	4,000	6,000	10,000	15,000
5) Pasang Implant	1 x	15,000	25,000	30,000	55,000	70,000
6) Buka Implant	1 x	15,000	25,000	30,000	55,000	70,000
7) Buka Pasang Implant	1 x	20,000	40,000	40,000	80,000	100,000
8) Pasang IUD	1 x	9,000	15,000	11,000	26,000	35,000
9) Buka IUD	1 x	9,000	15,000	11,000	26,000	35,000
10) Buka Pasang IUD	1 x	15,000	30,000	15,000	45,000	60,000
11) Imunisasi TT WUS	1 x	2,000	4,000	9,000	13,000	15,000
12) Imunisasi Caten						
a) Suntik TT	1x	2,000	4,000	9,000	13,000	15,000
b) Preg Test		5,000	3,000	12,000	15,000	20,000
c) Surat Keterangan		2,000	2,000	6,000	8,000	10,000
		9,000	9,000	27,000	36,000	45,000
<b>d. TINDAKAN MEDIK</b>						
<b>1. POLI GIGI</b>						
a) Pemeriksaan dan obat dasar	1 x	3,000	5,000	2,000	7,000	10,000
b) Konsultasi	1 x	500	3,500	1,000	4,500	5,000
c) Spuling Betadine	1 x	2,000	2,000	1,000	3,000	5,000

d) Extractri						
1) Exo gigi susu dengan Lidoc	1 Btg	5,000	8,000	5,000	13,000	18,000
2) Exo gigi susu dengan CE	1 Btg	4,500	4,500	3,000	7,500	12,000
3) Exo gigi tetap Anterior	1 Btg	7,000	10,000	6,000	16,000	23,000
4) Exo gigi tetap Posterior	1 Btg	8,000	11,000	7,000	18,000	26,000
5) Exo Komplikasi	1 Btg	10,000	15,000	10,000	25,000	35,000
e) Tumpatan						
1) Tumpatan Sementara	1 lbg	3,000	2,000	5,000	7,000	10,000
2) Tumpatan Tetap						
2.1) Amalgam						
• Kls I	1 lbg	7,000	14,000	9,000	23,000	30,000
• Kls II	1 lbg	10,000	15,000	10,000	25,000	35,000
• Kls V	1 lbg	7,000	14,000	9,000	23,000	30,000
2.2) Glass Ionomer						
• Kls I	1 lbg	7,000	17,000	11,000	28,000	35,000
• Kls II	1 lbg	10,000	18,000	12,000	30,000	40,000
• Kls III	1 lbg	7,000	17,000	11,000	28,000	35,000
• Kls IV	1 lbg	10,000	18,000	12,000	30,000	40,000
• Kls v	1 lbg	7,000	17,000	11,000	28,000	35,000
2.3) Light Cure						
• Kls I	1 lbg	15,000	27,000	18,000	45,000	60,000
• Kls II	1 lbg	20,000	33,000	22,000	55,000	75,000

• Kls III	1 lbg	15,000	27,000	18,000	45,000	60,000
• Kls IV	1 lbg	20,000	33,000	22,000	55,000	75,000
• Kls V	1 lbg	15,000	27,000	18,000	45,000	60,000
f) Perawatan Saluran Akar						
1) Open Bur						
a) gigi anterior	1 x	5,000	9,000	6,000	15,000	20,000
b) gigi posterior	1 x	7,000	11,000	7,000	18,000	25,000
2) Extirpasi, reaming, filling						
a) gigi anterior	1 x	10,000	12,000	8,000	20,000	30,000
b) gigi posterior	1 x	15,000	15,000	10,000	25,000	40,000
3) Ganti Obat	1 x	5,000	6,000	4,000	10,000	15,000
4) Pengisian Saluran Akar						
a) Pengisian Saluran Akar Konvensional						
• gigi anterior	1 x	10,000	12,000	8,000	20,000	30,000
• gigi posterior	1 x	15,000	15,000	10,000	25,000	40,000
b) Pengisian Saluran Akar dengan 3 mix						
• gigi anterior	1 x	12,000	14,000	9,000	23,000	35,000
• gigi posterior	1 x	17,000	17,000	11,000	28,000	45,000
g) Pulp Capping	1 x	5,000	9,000	6,000	15,000	20,000
h) Bongkar Tambalan Permanen	1 lbg	3,000	7,000	5,000	12,000	15,000
i) Scalling						
1) rahang ( RA / RB )	1 x	15,000	27,000	18,000	45,000	60,000
2) rahang ( RA & RB )	1 x	30,000	54,000	36,000	90,000	120,000

j) Incisi Abses						
1) Intra Oral	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
2) Extra Oral	1 x	10,000	21,000	14,000	35,000	45,000
k) Uperculektomi	1 reg	15,000	27,000	18,000	45,000	60,000
l) Alveolektomi	1 reg	20,000	36,000	24,000	60,000	80,000
m) Odontektomi	1 btg	40,000	120,000	40,000	160,000	200,000
n) Kontrol pasca bedah	1 x	3,000	4,500	2,500	7,000	10,000
o) Buka jahitan	1 x	3,000	4,500	2,500	7,000	10,000
<b>2. UNIT GAWAT DARURAT</b>						
a. Pemeriksaan dokter umum + administrasi	1 x	2,000	10,000	3,000	13,000	15,000
b. Pemeriksaan dokter gigi + administrasi	1 x	2,000	10,000	3,000	13,000	15,000
c. Pemeriksaan dokter spesialis + administrasi	1 x	5,000	20,000	5,000	25,000	30,000
d. Tindakan Medik Anak						
1) Imunisasi	1 x	5,000	4,000	11,000	15,000	20,000
2) Mantoux Test	1 x	10,000	20,000	90,000	110,000	120,000
3) Resusitasi	1 x	10,000	20,000	15,000	35,000	45,000
4) Sircumsisi bayi perempuan	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
5) Tindik	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
e. Tindakan Medik bedah						
1) Ganti balutan < 10 cm	1 x	5,000	5,000	5,000	10,000	15,000
2) Ganti balutan > 10 cm	1 x	8,000	7,000	5,000	12,000	20,000
3) Jahit luka						
a) 5 jahitan pertama	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
b) Selanjutnya penjahitan	1 x	1,000	1,000	1,000	2,000	3,000

4) Buka jahitan < 5 jahitan	1 x	2,500	7,500	5,000	12,500	15,000
- Selanjutnya penjahitan	1 x	500	500	500	1,000	1,500
5) Ekstraksi kuku	1 x	10,000	25,000	15,000	40,000	50,000
6) Sirkumsisi dewasa	1 x	25,000	250,000	75,000	325,000	350,000
7) Sirkumsisi anak	1 x	25,000	200,000	75,000	275,000	300,000
8) Pemasangan ransel vrband	1 x	10,000	30,000	10,000	40,000	50,000
9) Eksisi tumor	1 x	10,000	35,000	15,000	50,000	60,000
10) Incisi abces	1 x	5,000	10,000	10,000	20,000	25,000
11) Imobilisasi dg spalk	1 x	10,000	15,000	15,000	30,000	40,000
12) Eksplorasi luka	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
13) Perawatan Luka	1 x	4,000	8,000	8,000	16,000	20,000
14) Debridement luka bakar < 20%	1 x	5,000	15,000	15,000	30,000	35,000
15) Debridement luka bakar > 20%	1 x	10,000	20,000	20,000	40,000	50,000
16) Reposisi Mandibula	1 x	5,000	25,000	15,000	40,000	45,000
17) Bilas Lambung	1 x	5,000	25,000	10,000	35,000	40,000
18) Rendan Bokong	1 x	2,000	5,000	3,000	8,000	10,000
19) Pasang Kateter	1 x	5,000	10,000	10,000	20,000	25,000
<i>f. Tindakan Keperawatan</i>						
1) Suntikan 1x/hari	1 x	500	1,500	1,000	2,500	3,000
2) Suntikan 2-5x/hari	1 x	1,000	2,500	1,500	4,000	5,000
3) Pengambilan sampel darah	1 x	500	2,500	2,000	4,500	5,000

4) Pemasangan Infus	1 x	10,000	18,000	12,000	30,000	40,000
5) Pencabutan Infus	1 x	1,000	3,000	1,000	4,000	5,000
6) Klisma	1 x	2,500	7,500	5,000	12,500	15,000
7) Suction/hari	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
8) Pemasangan NGT	1 x	10,000	25,000	15,000	40,000	50,000
<b>g. Tindakan Medis</b>						
<b>Anastesi</b>						
1) Resusitasi jantung paru (dokter umum)	1 x	10,000	40,000	10,000	50,000	60,000
2) Penanggulangan nyeri	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
<b>n. Tindakan Medik Mata</b>						
1) Ekstraksi copus alienum di mata	1 x	7,500	12,500	10,000	22,500	30,000
2) Irigasi / Spooling	1 x	5,000	10,000	5,000	15,000	20,000
3) Test isihara	1 x	2,500	2,500	5,000	7,500	10,000
4) Ganti Verband mata	1 x	5,000	7,500	7,500	15,000	20,000
<b>i. Tindakan Medik Paru</b>						
- Inhalasi/Nebulizer	1 x	5,000	5,000	10,000	15,000	20,000
<b>j. Tindakan Medik THT</b>						
1) Ekstraksi serumen	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
2) Tampon telinga	1 x	5,000	7,500	7,500	15,000	20,000
3) Ekstraksi corpus alienum di telinga	1 x	5,000	12,500	12,500	25,000	30,000
4) Pasang tampon anterior	1 x	5,000	10,000	10,000	20,000	25,000

5) Cabut tampon anterior	1 x	5,000	10,000	10,000	20,000	25,000
6) Pasang tampon posterior	1 x	5,000	10,000	10,000	20,000	25,000
7) Cabut tampon posterior	1 x	5,000	10,000	10,000	20,000	25,000
8) Belog tampon	1 x	5,000	10,000	10,000	20,000	25,000
9) Ekstraksi corpus alienum di hidung	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
10) Tindik (dewasa)	1 x	5,000	10,000	10,000	20,000	25,000
<b>k. Tindakan Medik Kulit Kelamin</b>						
1) Clavus kecil	1 x	5,000	30,000	15,000	45,000	50,000
2) Clavus Besar	1 x	10,000	40,000	20,000	60,000	70,000
3) Papiloma	1 x	15,000	45,000	25,000	70,000	85,000
4) Larva migran	1 x	5,000	10,000	5,000	15,000	20,000
<b>l. Keracunan</b>						
1 x	1 x	10,000	20,000	30,000	50,000	60,000
<b>m. Digigit Binatang</b>						
1 x	1 x	5,000	15,000	10,000	25,000	30,000
<b>3. TINDAKAN KEBIDANAN</b>						
<b>1. Partus normal</b>						
a) Bidan	1 x	50,000	150,000	50,000	200,000	<b>250,000</b>
b) Dokter Umum	1 x	50,000	250,000	100,000	350,000	400,000
c) Dokter Spesialis	1 x	50,000	400,000	150,000	550,000	600,000
<b>2. Partus dengan induksi</b>						
a) Bidan	1 x	75,000	175,000	50,000	225,000	300,000
b) Dokter Umum	1 x	75,000	275,000	100,000	375,000	450,000
c) Dokter Spesialis	1 x	75,000	500,000	125,000	625,000	700,000
<b>3. Partus dengan penyulit</b>						
a) Bidan	1 x	100,000	200,000	100,000	300,000	400,000

b) Dokter Umum	1 x	100,000	300,000	100,000	400,000	500,000
c) Dokter Spesialis	1 x	100,000	600,000	100,000	700,000	800,000
<b>4. Episiotomi</b>						
a) Grade I - III ( Bidan )	1 x	10,000	30,000	10,000	40,000	50,000
b) Grade I - III ( Dokter Umum )	1 x	15,000	45,000	15,000	60,000	75,000
c) Grade I - III ( Dokter Spesialis )	1 x	20,000	60,000	20,000	80,000	100,000
d) Grade IV ( dokter Spesialis )	1 x	25,000	150,000	25,000	175,000	200,000
<b>5. Eksplorasi Vagina</b>						
a) Bidan	1 x	15,000	50,000	10,000	60,000	75,000
b) Dokter Umum	1 x	20,000	65,000	15,000	80,000	100,000
c) Dokter Spesialis	1 x	30,000	150,000	25,000	175,000	205,000
<b>6. Manual plasenta</b>						
a) Bidan	1 x	20,000	110,000	20,000	130,000	150,000
b) Dokter Umum	1 x	30,000	190,000	30,000	220,000	250,000
c) Dokter Spesialis	1 x	40,000	270,000	40,000	310,000	350,000
<b>PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>						
<b>1. Electromedik</b>						
<b>a) Radiologi</b>						
<b>1) posisi 1 film</b>						
• Thorax PA	1 x	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000
• Abdomen PA	1 x	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000
• Pelvis AP	1 x	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000
• Clavicula ( D/S ) AP	1 x	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000
• Water's open mouth PA	1 x	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000

3	• Top Lordotic (Thorax)	1 x	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000
	• Os nasal bateral	1 x	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000
	• Shoulder AP	1 x	10,000	15,000	25,000	40,000	50,000
	2) posisi 1 film						
	• Manus PA - Oblig	1 x	15,000	20,000	35,000	55,000	70,000
	• Wrist Joint AP - Lateral	1 x	15,000	20,000	35,000	55,000	70,000
	• Elbow Joint AP - Lateral	1 x	15,000	20,000	35,000	55,000	70,000
	• Digiti AP - Lateral	1 x	15,000	20,000	35,000	55,000	70,000
	• Antebrachi AP - Lateral	1 x	15,000	20,000	35,000	55,000	70,000
	• Calcaneus Axial - Lateral	1 x	15,000	20,000	35,000	55,000	70,000
	• Ankle Joint AP - Lateral	1 x	15,000	20,000	35,000	55,000	70,000
	• Genu AP - Lateral	1 x	15,000	20,000	35,000	55,000	70,000
	3)posisi 2 film						
	• Thorax PA - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
	• Cervical AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
	• Skull AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
	• Thorakal AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
	• Sinus water's open mouth - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
	• TMJ open - close mouth	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
	• Os Humerus AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
	• Vert thoraco lumbal AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
• Vert lumbal AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000	
• Lumbo sacral AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000	

• Sacrum AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
• Coccyx AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
• Hip AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
• Femur AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
• Cruris AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
• Pedis AP - Lateral	1 x	20,000	25,000	50,000	75,000	95,000
4) posisi 3 - 4 film						
• Abdomen 3 posisi	1 x	30,000	30,000	120,000	150,000	180,000
• Cervical AP/Lateral/Obliq kanan - kiri	1 x	30,000	30,000	120,000	150,000	180,000
• Thoraco Lumbal AP/Lateral/Obliq kanan - kiri	1 x	30,000	30,000	120,000	150,000	180,000
• Thoracal AP/Lateral/Obliq kanan - kiri	1 x	30,000	30,000	120,000	150,000	180,000
• Lumbal AP/Lateral/Obliq kanan - kiri	1 x	30,000	30,000	120,000	150,000	180,000
• Lumbo - Sacral AP/Lateral/Obliq kanan - kiri	1 x	30,000	30,000	120,000	150,000	180,000
b) ntra Oral	1 x	5,000	5,000	15,000	20,000	25,000
c) Electrocardiografi	1 x	5,000	15,000	15,000	30,000	35,000
d) USG						
1)Tanpa film	1x	15,000	20,000	15,000	35,000	50,000
2)Dengan film	1 x	15,000	25,000	20,000	45,000	60,000
<b>2. Laboratorium</b>						
a) Hematologi						
1) Hematokrit	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000

2) Hb	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
3) Leucocyt	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
4) Diff Count / Hitung Jenis	1 x	2,000	5,000	3,000	8,000	10,000
5) BBS / LED	1 x	2,000	5,000	3,000	8,000	10,000
6) Malaria	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
7) Erytrocyt	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
8) Trombocyt	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
9) Bleeding Time	1x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
10) Chlothing Time	1x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
11) Golongan Darah	1 x	3,000	5,000	12,000	17,000	20,000
<b>b) Urine Analis</b>						
1) Protein	1 x	1,000	2,000	1,500	3,500	4,500
2) Reduksi	1 x	1,000	2,000	1,500	3,500	4,500
3) Bilirubin	1 x	1,000	2,000	1,500	3,500	4,500
4) Sedimen	1 x	1,000	2,000	1,500	3,500	4,500
5) Preg Test	1 x	5,000	3,000	12,000	15,000	20,000
6) Morfin	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
7) THC / Ganja	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
8) Amfetamine	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
9) Cocaine	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
10) Benzodiazepin	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
11) Opium	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
<b>c) Faeces</b>						
1) Makroskopis	1 x	2,000	5,000	3,000	8,000	10,000

2) Mikroskopis	1 x	2.000	5.000	3.000	8.000	10.000
<i>d) Mikrobiologi</i>						
1) BTA	1 x	2.000	10.000	3.000	13.000	15.000
2) Secret Vagina	1 x	2.000	10.000	3.000	13.000	15.000
3) KOH	1 x	2.000	10.000	3.000	13.000	15.000
<i>e) Kimia Darah</i>						
1) Gula Darah	1 x	3.000	4.000	23.000	27.000	30.000
2) Kolesterol	1 x	3.000	4.000	23.000	27.000	30.000
3) Triglisericid	1 x	3.000	4.000	23.000	27.000	30.000
4) Uric Acid	1 x	3.000	4.000	23.000	27.000	30.000
<i>f) Serologi</i>						
1) Dengue Test	1 x	5.000	5.000	25.000	30.000	35.000
<i>Pemeriksaan Cyto / Diluar jam kerja tarif ditambah : 25% x tarif dasar</i>						
<b>3. PELAYANAN MEDICOLEGAL</b>						
Pemberian formalin	1 x	100.000	500.000	400.000	900.000	1.000.000
<b>4. MEDICAL CHECK UP</b>						
<i>a) KIR Kesehatan Biasa</i>						
1) Anamnese & Pemeriksaan Fisik						
• Poli Umum	1 x	3.000	5.000	2.000	7.000	10.000
• Poli Gigi	1 x	500	3.500	1.000	4.500	5.000
2) <i>Laboratorium</i>						
2.1) Darah rutin (Hb, Leukosit, Trombosit)	1 x	3.000	6.000	3.000	9.000	12.000

2.2) Urin rutin (Protein, Bilirubin, Reduksi, pH.)	1 x	4.000	6.000	4.500	10.500	14.500
2.3) Golongan darah	1 x	3.000	5.000	12.000	17.000	20.000
3) Surat keterangan/administrasi	1 x	2.000	2.000	6.000	8.000	10.000
		15.500	27.500	28.500	56.000	71.500
<b>b) Pemeriksaan Medical Standar</b>						
1) Anamnesis & Pemeriksaan Fisik						
1.1) Poli Umum	1 x	3.000	5.000	2.000	7.000	<b>10.000</b>
1.2) Poli Gigi	1 x	500	3.500	1.000	4.500	5.000
2) Pemeriksaan Visus	1 x	1.000	3.000	1.000	4.000	5.000
3) Pemeriksaan Buta Warna	1 x	500	1.500	1.000	2.500	3.000
4) Thorax foto	1 x	15.000	10.000	30.000	40.000	55.000
5) Laboratorium						
5.1) Darah rutin	1 x	3.000	6.000	3.000	9.000	12.000
5.2) Urin rutin	1 x	4.000	6.000	4.500	10.500	14.500
5.3) Golongan darah	1 x	3.000	5.000	12.000	17.000	20.000
6) Surat keterangan / administrasi	1 x	2.000	2.000	6.000	8.000	10.000
		32.000	42.000	60.500	102.500	134.500
<b>c) Pemeriksaan Medical Calon Karyawan</b>						
1) Pemeriksaan medical standar	1 x	32.000	42.000	60.500	102.500	134.500
2) Laboratorium						
2.1) Darah						
• Hitung Jenis	1 x	2.000	5.000	3.000	8.000	10.000
• Laju Endap Darah	1 x	2.000	5.000	3.000	8.000	10.000

• Bleeding Time (BT)	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
• Chlothing Time (CT)	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
2.2) Urine						
• Makroskopis	1 x	2,000	5,000	3,000	8,000	10,000
• Mikroskopis	1 x	4,000	4,000	6,000	10,000	14,000
• Erytrosit						
• Leococyt						
• Epitel						
• Kristal						
2.3) Serologi						
• Hepatitis B	1 x	10,000	10,000	40,000	50,000	60,000
2.4) Narkoba						
• Morfin	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
• Amfetamine	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
• Benzodiazepin	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
• THC / Ganja	1 x	3,000	10,000	37,000	47,000	50,000
3) EKG	1 x	<u>5,000</u>	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>30,000</u>	<u>35,000</u>
		71,000	130,000	280,500	410,500	481,500
d) Pemeriksaan Medical Calon Jamaah Haji						
1) Anamnese & pemeriksaan fisik, jiwa & Barthel index	1 x	5,000	30,000	15,000	45,000	50,000
2) Pemeriksaan penunjang						
2.1) Laboratorium						
(i) Darah						
• HB	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
• LED	1 x	2,000	5,000	3,000	8,000	10,000
• Leuco	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
• Golongan darah	1 x	3,000	5,000	12,000	17,000	20,000

	• GDS	1 x	3,000	4,000	23,000	27,000	30,000
	• Kolesterol	1 x	3,000	4,000	23,000	27,000	30,000
	(ii) Urine						
	• Makroskopis	1 x	2,000	5,000	3,000	8,000	10,000
	• Mikroskopis	1 x	4,000	4,000	6,000	10,000	14,000
	• Protein	1 x	1,000	2,000	1,000	3,000	4,000
	• Test Kehamilan	1 x	5,000	3,000	12,000	15,000	20,000
	2.2) EKG	1 x	5,000	15,000	15,000	30,000	35,000
	2.3) Radiologi (Thorax)	1 x	15,000	10,000	30,000	40,000	55,000
	3) Administrasi	1 x	<u>2,000</u>	<u>5,000</u>	<u>7,000</u>	<u>12,000</u>	<u>14,000</u>
			52,000	96,000	152,000	248,000	300,000
	<b>LAIN - LAIN</b>						
	<i>a. Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka pemberian Surat Keterangan</i>						
	1) Kelahiran	1 x	3,000	3,000	9,000	12,000	15,000
	2) Sakit	1 x	1,000	1,500	2,500	4,000	5,000
	3) Dirawat	1 x	2,000	3,000	5,000	8,000	10,000
4	4) Laik Naik Pesawat	1 x	2,000	3,000	5,000	8,000	10,000
	5) Kematian	1 x	2,000	3,000	5,000	8,000	10,000
	<i>b. Ambulance</i>						
	1) ≤ 5 km pertama	1 x	8,000	17,000	15,000	32,000	40,000
	2) Selebihnya/km	1 x	1,000	1,200	1,300	2,500	3,500
	3) Luar Pulau :						
	• belum termasuk biaya penyebrangan						
	• 2x tarif dalam pulau						

	<b>c. Jasa Petugas Pendamping Rujukan</b>						
	1) Dokter	1 x					
	a) ≤ 5 km pertama		5,000	25,000	-	25,000	30,000
	b)Selibhnya / km		1,000	2,500	-	2,500	3,500
	c)Luar pulau (dalam negeri )						
	• belum termasuk biaya penyebrangan						
	• 2x tarif dalam pulau bintang						
	2) Perawat / Bidan	1 x					
	a) ≤ 5 km pertama		3,000	12,000	-	12,000	15,000
	b) Selibhnya / km		500	1,000	-	1,000	1,500
	c) Luar pulau (dalam negeri )						
	• belum termasuk biaya penyebrangan						
	• 2x tarif dalam pulau bintang						
	<b>RAWAT INAP</b>						
	<b>a. Kelas Utama</b>						
	1) Akomodasi	1 hr	75,000	75,000	100,000	175,000	250,000
	2) Visit Dokter						
	a) Dokter spesialis	1 hr	-	44,000	26,000	70,000	70,000
	b) Dokter Umum / Gigi	1 hr	-	38,000	22,000	60,000	60,000
	3) Visit Dokter Rawat Gabung						
	a) Dokter spesialis	1 hr	-	52,000	38,000	90,000	90,000
	b) Dokter Umum / Gigi	1 hr	-	37,000	28,000	65,000	65,000
5	4) Cyto konsul						
	a) Dokter spesialis	1 x	-	100,000	-	100,000	100,000
	b) Dokter Umum / Gigi	1 x	-	45,000	-	45,000	45,000
	<b>b. Kelas I</b>						
	1) Akomodasi	1 hr	40,000	40,000	70,000	110,000	150,000

2) Visit Dokter							
a) Dokter spesialis	1 hr	-	40,000	25,000	65,000	65,000	
b) Dokter Umum / Gigi	1 hr	-	32,000	18,000	50,000	50,000	
3) Visit Dokter Rawat Gabung							
a) Dokter spesialis	1 hr	-	46,000	24,000	70,000	70,000	
b) Dokter Umum / Gigi	1 hr	-	34,000	16,000	50,000	50,000	
4) Cyto konsul	1 x		40,000	-	40,000	40,000	
a) Dokter spesialis	1 x	-	80,000	-	80,000	80,000	
b) Dokter Umum / Gigi	1 x	-	40,000	-	40,000	40,000	
<b>c. Kelas II</b>							
1) Akomodasi	1 hr	30,000	30,000	40,000	70,000	100,000	
2) Visite Dokter							
a) Dokter spesialis	1 hr	-	32,000	13,000	45,000	45,000	
b) Dokter Umum / Gigi	1 hr	-	28,000	12,000	40,000	40,000	
3) Visite Dokter Rawat	1 hr						
Gabung		-	35,000	20,000	55,000	55,000	
a) Dokter spesialis							
b) Dokter Umum	1 hr	-	30,000	15,000	45,000	45,000	
4) Cyto konsul							
a) Dokter spesialis	1 x	-	60,000	-	60,000	60,000	
b) Dokter Umum / Gigi	1 x	-	35,000	-	35,000	35,000	
<b>d. Kelas III</b>							
1) Akomodasi	1 hr	20,000	15,000	10,000	25,000	45,000	
2) Visite Dokter							
a) Dokter spesialis	1 hr	-	30,000	10,000	40,000	40,000	
b) Dokter Umum	1 hr	-	20,000	10,000	30,000	30,000	
3) Visite Dokter Rawat Gabung							
a) Dokter spesialis	1 hr	-	30,000	15,000	45,000	45,000	
b) Dokter Umum	1 hr	-	28,000	12,000	40,000	40,000	
4) Cyto konsul	1 x		35,000	-	35,000	35,000	
a) Dokter spesialis	1 x	-	50,000	-	50,000	50,000	
b) Dokter Umum / Gigi	1 x		30,000	-	30,000	30,000	

<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kesatu</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nama, Objek dan Subjek Retribusi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;</li> <li>b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan</li> <li>c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.</li> </ol> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainnya.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 8</b></p> <p>Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasal 9</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.</p> <p>(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.</p> <p>(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif Retribusi Pasal 11</p> <p>(1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah non real estate berdasarkan luas bangunan :</p>	Tetap

Luas	Tarif
- Lebih kecil atau sama dengan 21 m2	Rp. 2.000,- / bulan
- 22 m2 sampai dengan 70 m2	Rp. 3.500,- / bulan
- 71 m2 sampai dengan 200 m2	Rp. 4.500,- / bulan
- 201 m2 sampai dengan 300 m2	Rp. 6.000,- / bulan
- Diatas 300 m2	Rp. 3.500,- / bulan

- b. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah Real Estate ditetapkan berdasarkan luas bangunan :

Luas	Tarif
21 m2 sampai dengan 36 m2	Rp. 7.000,- / bulan
37 m2 sampai dengan 54 m2	Rp. 8.500,- / bulan
55 m2 sampai dengan 70 m2	Rp. 10.000,- / bulan
71 m2 sampai dengan 120 m2	Rp. 12.500,- / bulan
Diatas 120 m2	Rp. 17.000,- / bulan

- c. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari kategori perkantoran, pasar, pertokoan, mall, gedung pertunjukkan, apotik, klinik, usaha pertukangan / pengolahan bahan berdasarkan volume sampah yang dihasilkan :

Volume	Tarif
Lebih kecil dari 0,50 m3 /hari	Rp. 25.000,- / bulan
0,51 m3 sampai dengan 0,75 m3 /hari	Rp. 35.000,- / bulan

- d. Pengambilan, pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah, dari sumber sampah, lembaga pendidikan / kursus, rumah sewaan (tempat kos), rumah makan / restoran, hotel / apartemen, pabrik / industri, rumah sakit / rumah bersalin, ditetapkan berdasarkan kubikasi:

Volume	Tarif
Lembaga Pendidikan / Kursus	Rp. 6.000,- / m3
Rumah sewaan / tempat kos	Rp. 7.500,- / m3
Rumah Makan	Rp. 11.000,- / m3
Restoran	Rp. 15.000,- / m3
Hotel / Apartemen	Rp. 15.000,- / m3
Rumah Sakit / Rumah Bersalin	Rp. 10.000,- / m3
Bioskop	Rp. 12.000,- / m3

- e. Pengambilan, pengangkutan pengelolaan dan pemusnahan sampah di pasar, berdasarkan kegiatan usaha pedagang ditetapkan dengan system pengambilan harian.

Jenis	Tarif
Kios	Rp. 1.000,- / hari
Los	Rp. 1.000,- / hari
Awning	Rp. 1.000,- / hari
Kaki lima / pedagang makanan tidak menetap.	Rp. 1.000,- / hari
Ruko.	Rp. 3.000,- / hari
Toko	Rp. 2.500,- / hari

- (2) Apabila pengambilan, pengangkutan tidak dapat memberlakukan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka untuk menentukan Retribusi pelayanan dimaksud dapat ditaksir dengan perhitungan ril yang ditetapkan sebesar Rp. 85.000,- (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) / rit.
- (3) Penggunaan tempat pembuangan akhir sampah milik Pemerintah Daerah oleh swasta baik pribadi maupun Badan yang berasal dari wilayah Kabupaten Bintan dikenakan Retribusi pembuangan sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah ) / m<sup>3</sup>.

BAB V  
RETRIBUSI PENGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN  
AKTA CATATAN SIPIL  
Bagian Kesatu

3. Bab V  
Pasal 11 dihapus

<p style="text-align: center;">Nama, Objek dan Subjek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.</p> <p>(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Tanda Penduduk</li> <li>b. Kartu Keterangan bertempat tinggal</li> <li>c. Kartu Identitas kerja</li> <li>d. Kartu penduduk sementara</li> <li>e. Kartu identitas penduduk musiman</li> <li>f. Kartu keluarga, dan</li> <li>g. Akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Subyek Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.</p>	<p>Pasal 12 dihapus</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retibusi Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan/kartu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13 dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif Retribusi Pasal 14</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14 dihapus</p>

(1) Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Kependudukan adalah sebagai berikut :

Pelayanan	Tarif
a. Kartu Keluarga	
1. Warga Negara Indonesia	Rp. 0/ Gratis
2. Warga Negara Asing	Rp. 150.000,-
b. Kartu Tanda Penduduk :	
1. Warga Negara Indonesia	Rp. 0/ Gratis
2. Warga Negara Asing	Rp. 200.000,-
c. Kartu Identitas Penduduk Sementara	Rp. 20.000,-
d. Surat Keterangan Kematian :	
1. Warga Negara Indonesia	Rp. 0/ Gratis
2. Warga Negara Asing	Rp. 50.000,-
e. Surat Keterangan Pindah	
1. Warga Negara Indonesia	Rp. 5.000,-
2. Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
f. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.(SKPPS) dan izin Tempat Tinggal Sementara (SITTS) Bagi Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
g. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTSP) Bagi Warga Negara Asing dan Izin Tempat Tinggal Sementara Bagi Warga Negara Asing.	Rp. 100.000,-
h. Keterangan tidak mampu	Rp. 0,-/Gratis

(2) Struktur dan Besarannya tarif Pelayanan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

Pelayanan	Tarif
a. Biaya Akta :	
1. Biaya Pencatatan dan Kutipan kematian	
a. WNI	Rp. 0/ Gratis
b. WNA	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Perkawinan	
a. Warga Negara Indonesia	
1) Didalam Kantor	Rp. 100.000,-
2) Diluar Kantor.	Rp. 150.000
b. Warga Negara Asing	
1) Didalam Kantor.	Rp. 200.000,-
2) Diluar Kantor.	Rp. 300.000,-
3. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Perceraian	Rp. 50.000,-
a. Warga Negara Indonesia .	
b. Warga Negara Asing .	Rp. 100.000,-
4. Biaya Pencatatan dan Kutipan pengakuan dan pengesahan Anak :	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 100.000,-
5. Biaya Pencatatan dan Kutipan Pengangkatan Anak/Adopsi :	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp. 500.000,-
6. Biaya Pencatatan dan Kutipan Perubahan Nama / Ganti Nama	
a. Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
b. Warga Negara Asing	Rp.100.000,-

<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Tingkat Pengguna Jasa Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.</p>	Tetap

Bagian Ketiga  
Struktur Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 18

Besarnya tarif Retribusi Parkit di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Parkir Biasa

JENIS	TARIF
a. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 200 / sekali parkir
b. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Rp. 500 / sekali parkir
c. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mini bus dan sejenisnya	Rp. 1000 / sekali parkir
d. Kendaraan Bus	Rp. 2500 / sekali parkir
e. Kendaraan Mobil Barang Roda Empat	Rp. 2500/ sekali parkir
f. Kendaraan Mobil Barang Roda Enam	Rp. 3000 / sekali parkir

Tetap

b. Parkir Berlangganan

JENIS	TARIF
a. Kendaraan tidak bermotor	Rp. 15.000 / Tahun
b. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga	Rp. 18.000 / Tahun
c. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, pick up, jeep, mini bus dan sejenisnya	Rp. 20.000 / Tahun
d. Kendaraan Bus	Rp. 35.000 / Tahun
e. Kendaraan Mobil Barang Roda Empat	Rp. 50.000/ Tahun
f. Kendaraan Mobil Barang Roda Enam	Rp. 60.000/ Tahun

<p style="text-align: center;">BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama,Objek dan Subjek Retribusi Pasal 19</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasal 21</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas tempat dan jangka waktu sewa tempat.</p>	Tetap														
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif Retribusi Pasal 22</p> <p>(1) Setiap pedagang yang melakukan usaha perdagangan di kawasan pasar tradisional diberikan Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) dan dikenakan Retribusi Pelayan Pasar</p> <p>(2) Besarnya tarif retribusi Pelayan Pasar ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="286 842 907 1155"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kios tidak bertingkat</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td>Kios bertingkat</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Los</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>Toko tidak bertingkat</td> <td>Rp. 250.000</td> </tr> <tr> <td>Toko bertingkat</td> <td>Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tendanisasi</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	Tarif	Kios tidak bertingkat	Rp. 150.000,-	Kios bertingkat	Rp. 200.000,-	Los	Rp. 75.000,-	Toko tidak bertingkat	Rp. 250.000	Toko bertingkat	Rp. 300.000,-	Tendanisasi	Rp. 75.000,-	Tetap
Jenis	Tarif														
Kios tidak bertingkat	Rp. 150.000,-														
Kios bertingkat	Rp. 200.000,-														
Los	Rp. 75.000,-														
Toko tidak bertingkat	Rp. 250.000														
Toko bertingkat	Rp. 300.000,-														
Tendanisasi	Rp. 75.000,-														

<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Nama, Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Tingkat Pengguna Jasa Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.</p>	Tetap

Bagian Ketiga  
Struktur Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 26

Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JUMLAH TARIF (Rp.)</b>
1	Biaya Administrasi dan Emplagement	2.000
2	Buku Uji	10.000
3	Tanda Uji 1 Unit	10.000
4	Stiker / Tanda Samping	10.000
5	Jasa Pemeriksaan :	23.000
	a. Uji Berkala	
	1. Mobil Penumpang Umum	23.000
	2. Angkot / Oplet	25.000
	3. Mobil Bis 9 seat s/d 28 seat	30.000
	4. Mobil Bis > 28 seat sebesar	30.000
	5. Pick Up, Light Truck < 5.500 Kg	25.000
	6. Truck, Dump Truck 5.500 – 15.000 Kg	35.000

Tetap

	7. Tronton > 15.000 Kg	50.000
	8. Mobil Tanki	25.000
	9. Tractor Head	50.000
	10. Kereta Tempelan	35.000
	11. Kereta Gandengan	35.000
	b. Uji berkala Pertama / Kendaraan baru :	
	1. Mobil Penumpang Umum	33.000
	2. Angkot / Oplet	33.000
	3. Mobil Bis 9 seat s/d 28 seat	35.000
	4. Mobil Bis > 28 seat sebesar	40.000
	5. Pick Up, Light Truck < 5.500 Kg	35.000
	6. Truck, Dump Truck 5.500 – 15.000 Kg	45.000
	7. Tronton > 15.000 Kg	60.000
	8. Mobil Tanki	35.000
	9. Tractor Head	60.000
	10. Kereta Tempelan	45.000
	11. Kereta Gandengan	45.000
6.	Penggantian Buku Uji hilang / rusak	25.000
7.	Penggantian Tanda Uji hilang / rusak perkeping	25.000

<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Nama,Objek, dan Subjek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasal 29</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif Retribusi Pasal 30</p> <p>(1) Besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian dan jenis alat pemadam kebakaran.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran.</p> <p>(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. biaya pemeriksaan dan pengecekan;</li> <li>b. biaya pengadaan racun api;</li> <li>c. biaya pengadaan segel;</li> <li>d. biaya transportasi;</li> <li>e. biaya label (tanda uji);</li> <li>f. stiker (tingkat ancaman); dan</li> <li>g. pembayaran bunga pinjaman.</li> </ul> <p>(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:</p>	Tetap

- a. tanah dan bangunan;
- b. pengadaan alat uji; dan
- c. pengembalian pokok pinjaman.

(5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

(6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan dan peralatan tersebut.

(7) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Ancaman Bahaya Kebakaran :

Jenis	Tarif
1. Hidran Kebakaran	Rp.10.000,-/titik/tahun
2. Pemercik/Spinkler	Rp. 1.000,-/titik/tahun
3. Alarm Kebakaran	
a. Otomatis	Rp. 2.500,-/titik/tahun
b. Manual	Rp. 5.000,-/titik/tahun
4. Alat Pemadam Api Ringan	
a. Jenis Air Bertekanan:	
1) Isi/ s.d 9 liter	Rp. 7.500,-/tahun
2) Isi lebih dari 9 liter	Rp.15.000,-/tahun

b. Jenis Busa Kimia (Chemical)	
1. Isi/ s.d 9 liter	Rp. 7.500,-/tahun
2. Isi lebih dari 9 liter	Rp.15.000,-/tahun
a. Jenis Busa Mekanik	
Isi lebih dari 6 Kg	Rp.15.000,-/tahun
5. Bangunan yang menyimpan bahaya kebakaran	
a. Tanda ancaman bahaya ringan	Rp. 20.000,-/meter
b. Tanda ancaman bahaya sedang	Rp. 20.000,-/meter
c. Tanda ancaman bahaya tinggi	Rp. 20.000,-/meter

(8) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak termasuk biaya bahan racun api dan atau bahan lain yang dibutuhkan.

<p>BAB X</p> <p>RETRIBUSI PENGANTI BIAYA CETAK PETA</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Nama, Objek dan Subjek Retribusi</p> <p>Pasal 31</p>	<p>Tetap</p>
--	--------------

<p>(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh cetak peta.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Tingkat Penggunaan Jasa, Masa dan Prinsip</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Struktur Besaran Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p>	Tetap

Besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pergantian biaya cetak peta, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Cetak (ukuran)			
		A0	A1	A2	A3
1.	Peta Foto	Rp. 850.000	Rp. 500.000	Rp. 250.000	Rp. 125.500
2.	Peta Tematik	Rp. 800.000	Rp. 490.000	Rp. 245.000	Rp. 122.500
3.	Peta Teknis	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 50.000	Rp. 25.000

**BAB XI**

**RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**Bagian Kesatu**

**Nama,Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 35**

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 36**

Tetap

Tetap

<p>Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasal 37</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah/volume pembuangan tinja ke instalasi pembuangan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur Besaran Tarif retribusi Pasal 38</p> <p>Besarnya Tarif terhadap pelayanan penyedotan kakus/jamban dan pembuangannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa penyedotan sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) per M3;</li> <li>b. Jasa pembuangan sebesar Rp. 6.500,00 (Enam ribu lima ratus rupiah) per M3.</li> </ol>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB XII</b> <b>RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELKOMUNIKASI</b> Bagian Kesatu Nama,Objek dan Subyek Retribusi Pasal 39</p>	Tetap

<p>(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Struktur Besaran Tarif Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Besaran tarif retribusi ditetapkan 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan bangunan menara telekomunikasi yang besarnya retribusi dikaitkan dengan Frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telkomunikasi tersebut.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga ketentuan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh SKPD dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi;</p> <p>(2) Besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.239.339 (dua juta dua ratus tiga</p>

puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) per menara telekomunikasi;

- (3) Biaya yang dikeluarkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional sesuai dengan standar harga dan satuan biaya di daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati, dengan komponen meliputi :
- (4) Standar harga dan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada aya t (3) paling lama ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi adalah jumlah komulatif dari nilai koefisien variabel menara dibagi banyaknya variable, dengan rincian dan nilai koefisien sebagaimana berikut :
  - a. Variabel lokasi (zona) menara ditetapkan berdasarkan besar kecilnya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan dengan klasifikasi sebagai berikut :

<b>Zona</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>JumlahPenduduk (Jiwa)</b>	<b>KoefisienBesaran</b>
1	Besar	> 15.000	<b>3</b>
2	Sedang	7.000 – 15.000	<b>2</b>
3	Kecil	< 7.000	<b>1</b>

- b. Variabel tinggi menara terdiri dari :
  - 1. > 60 meter, dengan nilai koefisien 3;
  - 2. 40-60 meter, dengan nilai koefisien sebesar 2; dan
  - 3. < 40 meter, dengan nilai koefisien sebesar 1.
- c. Variable jenis menara terdiri dari :

	<p>1. di atas bangunan (Roof Top), dengan nilai koefisien sebesar 3;</p> <p>2. tiang mikrosel (microsell pole), dengan nilai koefisien sebesar 2;</p> <p>dan</p> <p>3. di atas tanah (green field), dengan nilai koefisien sebesar 1</p> <p>(6) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung dengan rumus sebagaimana berikut :</p> <p>Tingkat Pengguna Jasa = <math>(\text{Var ZM} + \text{Var TM} + \text{Var JM}) / \sum \text{var}</math>.</p> <p>Keterangan :</p> <p>Var ZM = Variabel Zona Menara</p> <p>Var TM = Variabel Tinggi Menara</p> <p>Var JM = Variabel Jenis Menara</p> <p>(7) Besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dikenakan adalah hasil kali antara tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan tarif retribusi.</p> <p>5. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XII A dan disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 42C, sehingga BAB XIIA berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB XII A</p> <p style="text-align: center;">RETRIBUSI PELAYANAN TERA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Nama,Objek dan Subyek Retribusi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42A</p>
--	--

	<p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi Sebagai pembayaran atas Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Ala-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.</p> <p>(2) Objek Retribusi PelayananTera/TeraUlang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan</li><li>b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tera/tera ulang yang oleh Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban tera ulang atau yang dibebaskan dari kewajiban tera dan tera ulang.</p> <p>(4) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melaksanakan tera atau tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
--	--

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 42B

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42 C

NO	JENIS UTTP WAJIB TERA/ TERA ULANG	TARIF RETRIBUSI / BUAH	
		TERA/TERA ULANG	KALIBRASI
1	UKURAN PANJANG		
	a. Bahan dari kayu sampai dengan 1 m	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	b. Bahan dari logam		
	1. Sampai dengan 2 m	Rp. 6.000	Rp. 8.000
	2. Lebih 2 m sampai dengan 10 m	Rp. 12.000	Rp. 16.000
	3. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagian dengan	Rp. 12.000	Rp. 16.000
	4. Ukuran panjang jenis		
	a) Salib ukur	Rp. 12.000	Rp. 16.000
	b) Blok ukur	Rp. 12.000	Rp. 16.000
	c) Micrometer	Rp. 16.000	Rp. 22.000
	d) Jangka sorong	Rp. 12.000	Rp. 16.000
e) Alat ukur tinggi orang	Rp. 12.000	Rp. 16.000	
f) Counter meter	Rp. 16.000	Rp. 22.000	
g) Roll tester	Rp. 110.000	Rp. 160.000	
h) komparator	Rp. 160.000	Rp. 220.000	

		2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL CAUGE) a. mekanik b. elektronik	Rp 120.000 Rp 220.000	Rp 160.000 Rp 260.000	
		3	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L s/d 25 L c. Lebih besar dari 25 L	Rp 3.000 Rp 6.000 Rp 12.000	Rp 6.000 Rp 11.000 Rp 18.000	
		4	BEJANA UKUR a. Kapasitas kurang dari 50 L b. Kapasitas 50 L s/d 200 L c. Kapasitas >200 L s/d 1.000 L d. Kapasitas >1.000 L biaya pada huruf "d" angka ini ditambah tiap 1.000 L	Rp 20.000 Rp 50.000 Rp 100.000 Rp 200.000	Rp 30.000 Rp 70.000 Rp 120.000 Rp 240.000	
		5	TANGKI UKUR a. Bentuk silinder tegak 1. Kapasitas s/d 500 kL 2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut: a) Kapasitas selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL b) Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL s/d 2.000 kL setiap 10 kL c) Kapasitas selebihnya dari 2.000 kL s/d 10.000 kL setiap 10 kL d) Kapasitas selebihnya dari 10.000 kL s/d 20.000 kL setiap 10 kL e) Kapasitas selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 dihitung 10 kL b. Bentuk bola dan sferoidal 1. Kapasitas s/d 500 kL	Rp 100.000 Rp 3.000 Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 500 Rp 200	Rp 150.000 Rp 4.000 Rp 3.000 Rp 2.000 Rp 1.000 Rp 500	
				2. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut: a) Kapasitas selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap 10 kL b) Kapasitas selebihnya dari 1.000 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 kL c. Bentuk silinder datar 1. Kapasitas s/d 10 kL 2. Kapasitas Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut: a) Kapasitas selebihnya dari 10 kL s/d 50 kL setiap 10 kL b) Kapasitas selebihnya dari 50 kL setiap 10 kL bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 200.000 Rp 6.000 Rp 4.000	Rp 6.000 Rp 4.000 Rp 300.000 Rp 8.000 Rp 6.000

		6	TANGKI UKUR TEGAK			
		a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon				
		1. Kapasitas s/d 5 kL setiap kL	Rp	18.000	Rp	24.000
		2. Kapasitas lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut				
		a) 5 kL pertama	Rp.	90.000	Rp.	120.000
		b) Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL bagian dari kL dihitung 1 kL	Rp.	25.000	Rp.	35.000
		b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal.				
		1. Kapasitas s/d 50 kL	Rp.	5.000	Rp.	7.000
		2. Kapasitas lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut				
		a) 50 kL pertama	Rp.	250.000	Rp.	350.000
		b) Selebihnya dari 50 kL s/d 75 kL setiap kL	Rp.	10.000	Rp.	14.000
		c) Selebihnya dari 75 kL s/d 100 kL setiap kL	Rp.	5.000	Rp.	7.000
		d) Selebihnya dari 100 kL s/d 250 kL setiap kL	Rp.	3000	Rp.	5000
		e) Selebihnya dari 250 kL s/d 500 kL setiap kL	Rp.	2000	Rp.	4000
		f) Selebihnya dari 500 kL s/d 1.000 kL setiap kL	Rp.	1000	Rp.	3000
		g) Selebihnya dari 1.000 kL s/d 5.000 kL setiap kL	Rp.	500	Rp.	2000
		Bagian dari kL dihitung satu kL tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat				
		7	ALAT UKUR DARI GELAS			
		a. Buret dan pipet	Rp.	2.000	Rp.	3.000
		b. Labu ukur	Rp.	16.000	Rp.	26.000
		c. Gelas ukur	Rp.	26.000	Rp.	42.000
		8	ANAK TIMBANGAN			
		a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
1. Sampai dengan 1 kg	Rp	2.000	Rp	3.000		
2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp	3.000	Rp	4.000		
3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp	5.000	Rp	6.000		
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
1. Sampai dengan 1 kg	Rp	3.000	Rp	3.000		
2. Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Rp	4.000	Rp	6.000		
3. Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Rp	6.000	Rp	8.000		



	10	METER TAKSI	Rp. 12.000	Rp. 16.000
	11	SPEEDOMETER	Rp. 16.000	Rp. 22.000
	12	METER REM	Rp. 14.000	Rp. 18.000
	13	TACHNOMETER	Rp. 28.000	Rp. 36.000
	14	THERMOMETER	Rp. 22.000	Rp. 32.000
	15	DENSIMETER	Rp. 24.000	Rp. 34.000
	16	VISKOMETER	Rp. 12.000	Rp. 16.000
	17	ALAT UKUR LUAS	Rp. 14.000	Rp. 18.000
	18	ALAT UKUR SUDUT	Rp. 16.000	Rp. 22.000
	19	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. Master bahan bakar minyak 1. Meter induk untuk setiap meja uji a). Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h b). lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb : 1). 25 m <sup>3</sup> /h pertama 2). Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h 3). Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h 4). Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung 1 m <sup>3</sup> /hh  2. Meter Kerja a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb : 1). 15 m <sup>3</sup> /h pertama 2). Selebihnya dari 25m <sup>3</sup> /h s/d 100 m <sup>3</sup> /h 3). Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s/d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h 4). Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung 1 m <sup>3</sup> /h  3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	Rp. 160.000 Rp. 160.000 Rp. 10.000 Rp. 8.000 Rp. 5.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 6.000 Rp. 4.000 Rp. 3.000 Rp. 50.000	Rp. 180.000 Rp. 180.000 Rp. 12.000 Rp. 10.000 Rp. 6.000 Rp. 140.000 Rp. 140.000 Rp. 8.000 Rp. 6.000 Rp. 4.000 Rp. 70.000

	20	ALAT UKUR GAS		
		a. Master Induk		
		1).Sampai dengan 100 m3/h	Rp 120.000	Rp 140.000
		2).Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :		
		1. 100 m3/h pertama	Rp 120.000	Rp 140.000
		2. Selebihnya dari 100 m3/h s/d 500 m3/h setiap 10 m3/h	Rp 4.000	Rp 6.000
		3. Selebihnya dari 500 m3/h s/d 1.000 m3/h setiap 10 m3/h	Rp 2.000	Rp 4.000
		4. Selebihnya dari 1.000 m3/h s/d 2.000 m3/h setiap 10 m3/h	Rp 1.000	Rp 2.000
		5. Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h	Rp 500	Rp 1.000
		b. Meter kerja		
		1. Sampai dengan 50m3/h	Rp 10.000	Rp 20.000
		2. Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :		
		a) Selebihnya dari 50 m3/h s/d 500 m3/h setiap 10 m3/h	Rp 10.000	Rp 20.000
		b) Selebihnya dari 500 m3/h s/d 1.000 m3/h setiap 10m3/h	Rp 500	Rp 1.000
		c) Selebihnya dari 1.000 m3/h s/d 2.000 m3/h setiap 10m3/h	Rp 300	Rp 500
		d) Selebihnya dari 1.000 m3/h s/d 2.000 m3/hsetiap 10 m3/h	Rp 200	Rp 300
		e) Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap 10 m3/h Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h	Rp 100	Rp 200
		c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan suatu sistem/alat ukur)	Rp. 100.000	Rp 200.000
		d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersen diri). Setiap alat perlengkapan	Rp 20.000	Rp 40.000
		e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur.	Rp 20.000	Rp 40.000
		21	METER AIR	
a. Meter Induk				
1. Sampai dengan 15 m3/h	Rp 20.000		Rp 40.000	
2. Lebih dari 15 m3/h s/d 100 m3/h	Rp 40.000		Rp 80.000	
3. Lebih dari 100 m3/h	Rp 50.000		Rp 100.000	
b. Meter Kerja				
1. Sampai dengan 10 m3/h	Rp 6.000		Rp 8.000	
2. Lebih dari 10 m3/h s/d 100 m3/h	Rp 12.000		Rp 16.000	
3. Lebih dari 100 m3/h	Rp 24.000		Rp 32.000	

22	METER LISTRIK (METER kWh)		
	a. Kelas 0,2 atau Kurang		
	1. 3 phasa	Rp 40.000	Rp 60.000
	2. 1 phasa	Rp 12.000	Rp 24.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1		
	1. 3 phasa	Rp 8.000	Rp 12.000
	2. 1 phasa	Rp 3.000	Rp 6.000
	c. Kelas 2		
	1. 3 phasa	Rp 6.000	Rp 8.000
	2. 1 phasa	Rp 2.000	Rp 4.000
	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan/penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22 ayat a s/d c.		
23	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Rp 2.000	Rp 5.000
24	STOP WATCH	Rp 5.000	Rp 8.000
25	METER PARKIR	Rp 22.000	Rp 32.000
26	METER PROVER		
	a. Kapasitas s/d 2.000 L	Rp 150.000	Rp 220.000
	b. Kapasitas 2.000 L s/dd 10.000 L	Rp 280.000	Rp 380.000
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 L	Rp 420.000	Rp 540.000
	Meter prover yang mempunyai dua seksi/lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
27	PEMBATAS ARUS AIR	Rp 3.000	Rp 6.000
28	ALAT KOMPENSASI : SUHU (Celcius) atau TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Rp 16.000	Rp 22.000
29	METER ARUS MASSA		
	Untuk setiap media uji :		
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Rp 60.000	Rp 100.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :		
	1. 10 kg/min pertama	Rp 60.000	Rp 100.000
	2. Selebihnya dari 100 kg/min setiap kg/min	Rp 500	Rp 1.000
	3. Selebihnya dari 100 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap Kg/min	Rp 400	Rp 600
	4. Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min	Rp 200	Rp 300
	5. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Rp 100	Rp 200

30	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRINTER RECORDER)	Rp 26.000	Rp 38.000
31	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak	Rp 12.000	Rp 18.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil	Rp 16.000	Rp 22.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain	Rp 24.000	Rp 32.000
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 s/d 31 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	Rp 12.000	Rp 16.000

NO.	URAIAN	TARIF Rp./UTTP
1.	BIAYA TAMBAHAN	
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :	
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, boboting sut dan timbangan pegas yang kapasitasnya $\geq 50$ kg	8.000
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	12.000
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	14.000
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	16.000
	3. UTTP yang ditanam.	12.000
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruktif khusus.	14.000
	5. UTTP yang ditera, terulang <b>dan kalibrasi</b> ditempat pakai atas permohonan pemilik :	
	a. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak	100.000
	b. Timbangan mekanik kapasitas :	
	1. Sampai dengan 25 kg	40.000
	2. > 25 kg s/d 150 kg	70.000
	3. > 150 kg s/d 500 kg	120.000
	4. >500 kg s/d 1.000 kg	160.000
	5. 1.000 kg s/d 3.000 kg	220.000
	c. Timbangan elektronik kapasitas :	
	1. Sampaidengan 25 kg	70.000
	2. > 25 kg s/d 150 kg	100.000
	3. > 150 kg s/d 500 kg	120.000
	4. >500 kg s/d 1.000 kg	240.000
	5. 1.000 kg s/d 3.000 kg	360.000
	d. Timbangan jembatan kapasitas :	
	1. Lebih kecil dari 20.000 kg	500.000
	2. Dari 20.000 – 50.000 kg	700.000
	3. > 50.000 – 100.000 kg	900.000

e. Timbangan pengisian kapasitas :	
1. 1 kg – 200 kg	100.000
2. 201 kg – 500 kg	140.000
3. 501 kg – 1.000 kg	340.000
4. 1.001 kg – 5.000 kg	740.000
5. > 5000 kg	860.000
f. Tangki ukur mobil kapasitas :	
1. Sampai dengan 5.000 L	400.000
2. 5.001 – 8.000 L	500.000
3. 8.001 – 16.000 L	1.000.000
4. 16.001 – 24.000 L	1.400.000
5. 24.001 – 32.000 L	1.800.000
g. Meter arus kerja	450.000
h. Tangki ukur	
1. Tangki ukur silinder datar/Liter	200
2. Tangki ukur Bola /Liter	1.000
3. Tangki ukur silinder tegak/Kilo Liter	200
4. Taangki ukur tongkang dan kapal/Kilo Liter	10.000
i. Meter kadar air	50.000
j. Ukuran Arus	
1. Meter kWh 1 phasa	5.000
2. Meter kWh 3 phasa	10.000
3. Meter air rumahtangga	5.000
4. Meter air industry	180.000
k. Bejana ukur	
1. 5 L – 20 L	120.000
2. 50 L – 100 L	300.000
3. 200 L – 500 L	600.000
4. 1.000 L – 5.000 L	1.000.000
l. Meter taksi	40.000
m. Counter meter	20.000
n. Pengujian BDKT :	
1. Pengisian otomatis	40.000
2. Pengisian manual	20.000
6. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	10.000

	<p style="text-align: center;"><b>Struktur Dan Besarnya Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) :</b></p> <table border="1" data-bbox="1272 370 2016 531"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi otomatis</td> <td>Kemasan</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengujian BDKT menggunakan mesin manual</td> <td>Kemasan</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	1.	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi otomatis	Kemasan	20.000	2.	Pengujian BDKT menggunakan mesin manual	Kemasan	10.000
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)										
1.	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi otomatis	Kemasan	20.000										
2.	Pengujian BDKT menggunakan mesin manual	Kemasan	10.000										
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII</b> <b>PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF</b> <b>Pasal 43</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.</p> <p>(2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>												
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIV</b> <b>PEMUNGUTAN RETRIBUSI</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Tata Cara Pemungutan</b> <b>Pasal 44</b></p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>												

<p>(1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bintan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 45</p> <p>(1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;</p> <p>(2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD ditetapkan.</p> <p>(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan Pasal 46</p> <p>(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi;</p>	Tetap

<p>(2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Sanksi Administrasi Pasal 47</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XV KEBERATAN Pasal 48</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p>	Tetap

<p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;"><b>BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 51</b></p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>Tetap</p>
---	--------------

<p>(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 52</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</li> <li>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ul> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XVIII</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.</p> <p>(4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;"><b>BAB XIX PEMANFAATAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 55</b></p> <p>Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;"><b>BAB XX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMERIKSAAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 56</b></p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 57</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li><li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li><li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li><li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li></ul>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"><li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li><li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;</li><li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li><li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;</li><li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li><li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li><li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 58</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 59</p> <p>(1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XXIV KETENTUAN KHUSUS Pasal 60</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka</p>	Tetap

<p>jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;</li> <li>b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">BAB XXV KETENTUAN PIDANA Pasal 61</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	Tetap

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, jenis, dan tata cara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Kijang pada tanggal 11 April 2011</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 27 Desember 2016</p>